

Judul : Sarankan pakai teknologi AI, legislator dukung ketahanan pangan
Tanggal : Senin, 09 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 12

Sarankan Pakai Teknologi AI

Legislator Dukung Ketahanan Pangan

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Adde Rosi Khoerunnisa mendorong penguatan regulasi kecerdasan artifisial (AI) untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. Aturan itu harus sejalan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sektor pangan nasional.

MENURUT Adde, pemanfaatan teknologi tidak bisa dilepaskan dari kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas. Tanpa regulasi yang kuat, inovasi berpotensi berjalan tanpa pengawasan dan berisiko bagi petani serta sistem pangan nasional. "DPR memiliki tanggung jawab memastikan setiap regulasi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," ucapnya.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, pembahasan RUU Pangan jadi momentum penting untuk memperkuat aspek

teknologi. Hingga kini, petani yang merupakan aktor utama dalam sistem ketahanan pangan justru menghadapi keterbatasan akses teknologi, pembiayaan, dan literasi digital.

Seharusnya, kata dia, kehadiran AI tidak diposisikan sebagai pengganti petani, melainkan sebagai pendamping. Pasalnya, teknologi bisa membantu mengelola risiko produksi dan distribusi. Dengan pendekatan yang tepat, keterbatasan petani dapat diminimalkan. "AI hadir untuk membantu dan mendampingi

petani, mengoptimalkan keterbatasan modal, akses, dan cuaca," ujarnya.

Adde juga mengingatkan pentingnya riset sebagai fondasi pengembangan AI. Saat ini, Pemerintah telah menunjukkan komitmennya melalui peningkatan dana riset abadi. Dukungan anggaran itu adalah modal penting inovasi, karena riset ketahanan pangan berbasis AI membutuhkan pembiayaan besar dan kesinambungan kebijakan.

"Negara-negara maju mengalokasikan anggaran jutaan dolar untuk sektor ini. Dana harus dimanfaatkan optimal," ucapnya.

Sejalan dengan itu, anggota BKSAP DPR Verrel Bramasta menilai, pemanfaatan AI juga berpeluang besar menekan food loss dan food waste. Dua persoalan itu jadi tantangan utama ket-

ahanan pangan nasional karena produksi yang tinggi belum tentu menjamin ketersediaan pangan.

"Kalau bicara inovasi, kita tidak perlu khawatir dari sisi produksi. Yang perlu didiskusikan adalah food loss dan food waste," ujar politikus PAN itu.

Dia menjelaskan, sekitar 31 persen pangan di Indonesia terbuang setiap tahun. Kerugian itu terjadi di berbagai mata rantai, mulai dari logistik, penyimpanan, dan manajemen pascapanen. Sistem yang belum terintegrasi jadi penyebab utama.

Menurutnya, pengalaman sejumlah negara menunjukkan AI mampu menekan limbah pangan secara signifikan. Teknologi bisa mendeteksi stok mendekati kedaluwarsa serta menyesuaikan distribusi. Pendekatan ini relevan untuk diterapkan di Indo-

nesia. "Di London, pemanfaatan AI mampu menurunkan limbah pangan hingga 87 persen," ungkapnya.

Verrel mendorong pengembangan sistem logistik berbasis AI yang terhubung dengan data produksi dan permintaan. Integrasi data jadi hal krusial agar kebijakan pangan lebih presisi, karena tanpa dukungan teknologi, pengendalian kerugian sulit dilakukan.

Dia menegaskan, penguatan regulasi, riset, dan infrastruktur digital harus berjalan seiring. Ketiganya menjadi fondasi utama ketahanan pangan modern. Tanpa sinergi, pemanfaatan AI berpotensi tidak optimal. "Dengan sistem yang terukur dan terintegrasi, food loss dan food waste bisa ditekan secara nyata," pungkasnya. ■ PYB